

**HEGEMONI DI RUANG MEDIA DIGITAL : ANALISIS *FRAMING*
DETIKCOM TERHADAP PEMBERITAAN PENERTIBAN
TANAH TERLANTAR OLEH KEMENTERIAN AGRARIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.)

Dalam Bidang Ilmu Politik



Mauludetul Hasanah

NIM 10040122104

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

MEI, 2026

PERNYATAAN PERTANGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mauludetul Hasanah
NIM : 10040122104
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Hegemoni Di Ruang Media Digital : Analisis *Framing*
detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlarang
Selama Dua Tahun Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang
dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti sebagai karya plagiasi, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 3 Juni 2025


METERAL
TEMPEL
3039A/X069773336
Mauludetul Hasanah

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Mauludetul Hasanah

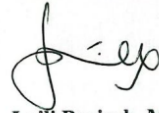
Nim : 10040122104

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul “ *Hegemoni Di ruang Media Digital : Analisis Framing detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian Agraria*” saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 3 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Laili Bariroh, M.Si

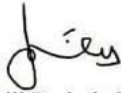
NIP :197711032009122002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Mauludetul Hasanah dengan judul “ **Hegemoni Di ruang Media Digital : Analisis Framing detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian Agraria** ” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji skripsi pada tanggal 18 Juni 2026.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



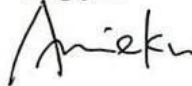
Laili Bariroh, M.Si.
NIP 197711032009122002

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, M.Si.
NIP 197202062007101003

Penguji III



Dr. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP 196909071994032001

Penguji IV



Holilah, S. Ag., M.Si.
NIP 197610182008012008

Surabaya, 18 Juni 2026

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.

NIP 197306272000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mauludekul Hasonah
NIM : 100 401 22 104
Fakultas/Jurusan : Fisip / Ilmu Politik
E-mail address : MauludekulHasonah82@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Hegemoni Di ruang media digital : analisis framing detikcom
terhadap pemberitaan penertiban tanah terlantar oleh kementerian
agraria.

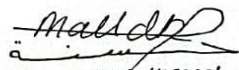
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juni 2026

Penulis


(Mauludekul Hasonah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Hasanah, Mauludetul, 2026 – Hegemoni Di Ruang Media Digital : Analisis *Framing* detikcom Terhadap Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Oleh Kementerian Agraria, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini mengkaji bagaimana media detikcom sebagai portal berita digital terbesar di Indonesia membingkai pemberitaan serta menganalisis praktek hegemoni yang terjadi dalam pemberitaan kebijakan penertiban tanah terlantar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam periode Juli–Agustus 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana *framing* detikcom dalam pemberitaan kebijakan penertiban tanah terlantar serta praktek hegemoni negara yang tercermin dalam pemberitaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis. Data dikumpulkan dari 14 berita detikcom yang dipilih secara *purposive* dan dianalisis menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman dengan empat *elemen define problem, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation* teori hegemoni untuk menginterpretasikan hasil dari *framing* tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dokumen dengan membandingkan temuan *framing* dengan dokumen resmi kebijakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama pemberitaan detikcom bergerak dalam tiga fase yang berbeda namun berkesinambungan. Pada fase awal, *framing* detikcom membentuk *common sense* yaitu menggunakan dominasi sumber resmi pemerintah dalam berita. Pada fase puncak detikcom mulai menghadirkan narasi kritis dari pengamat dan akademisi. Namun kritik tidak menggeser legitimasi negara, sebuah mekanisme yang dalam perspektif Gramsci disebut *war of position*. Pada fase landai fokus pemberitaan bergeser dari substansi kebijakan menuju persoalan miskomunikasi pejabat, sehingga berfungsi sebagai restorasi legitimasi negara. Kedua *framing* pemberitaan detikcom secara dominan memperkuat wacana kekuasaan negara melalui empat mekanisme: legitimasi, normalisasi, pengelolaan resistensi publik dan pemulihan hegemoni. Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, detikcom tidak berfungsi sebagai ruang diskursus publik yang netral, melainkan sebagai bagian dari apparatus hegemoni yang aktif mereproduksi persetujuan sosial (*consent*) terhadap kebijakan agraria negara melalui mekanisme *framing* yang tampak objektif namun secara ideologis bekerja untuk mempertahankan dominasi wacana kekuasaan.

Kata Kunci : *Framing* Media, Hegemoni, Tanah Terlantar, detikcom, Gramsci, Entman, Agraria, Media Digital, *Civil Society*, *Common sense* .

ABSTRACT

Hasanah, Mauludetul, 2026 - Hegemony in the Digital Media Sphere: A Framing Analysis of Detikcom's News Coverage on the Regulation of Abandoned Land by the Ministry of Agrarian

This study examines how Detikcom, as one of the largest digital news portals in Indonesia, framed news coverage and reflected hegemonic practices in reporting the abandoned land confiscation policy implemented by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) during the period of July–August 2025.

The purpose of this study is to identify how detikcom framed the abandoned land confiscation policy and to analyze the practices of state hegemony reflected in such coverage. This research employs a qualitative method within a critical paradigm. The data were collected from fourteen detikcom news articles selected through purposive sampling and analyzed using Robert N. Entman's framing analysis, which consists of four elements: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations. Gramsci's theory of hegemony was then used to interpret the framing findings. To ensure data validity, document triangulation was applied by comparing the framing results with official policy documents, particularly Government Regulation Number 20 of 2021 concerning the Control of Abandoned Areas and Land.

The findings reveal that detikcom's coverage developed through three interconnected phases. In the initial phase, detikcom's framing contributed to the formation of common sense through the dominance of official government sources in news reporting. In the peak phase, Detikcom began incorporating critical perspectives from observers and academics. However, such criticism did not undermine the legitimacy of the state, reflecting a mechanism that Gramsci conceptualizes as a war of position. In the declining phase, the focus of coverage shifted from the substance of the policy to issues of miscommunication by government officials, thereby functioning as a restoration of state legitimacy.

This study concludes that detikcom's news framing predominantly reinforced state power discourse through four mechanisms: legitimization, normalization, the management of public resistance, and the restoration of hegemony. From the perspective of Gramsci's theory of hegemony, detikcom does not function as a neutral space of public discourse; rather, it operates as part of a hegemonic apparatus that actively reproduces social consent toward state agrarian policies through framing mechanisms that appear objective but ideologically serve to maintain the dominance of state power discourse.

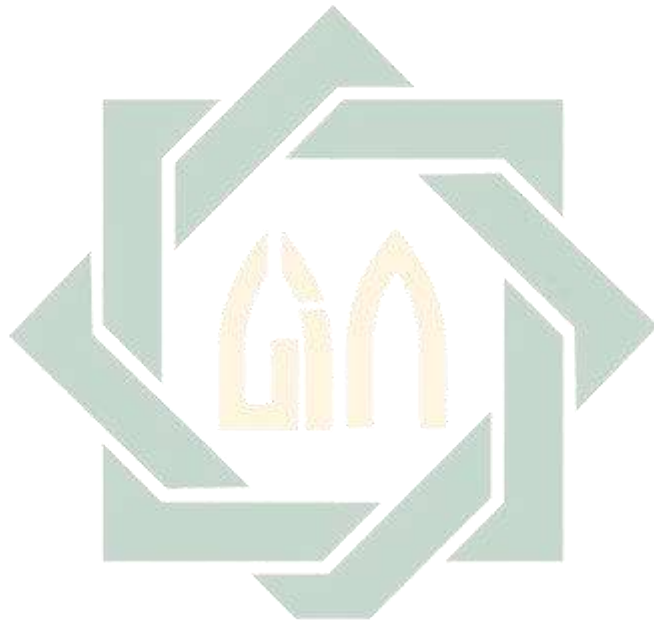
Keywords: *Media Framing, Hegemony, Abandoned Land, detikcom, Gramsci, Entman, Agrarian Policy, Digital Media, Civil Society, Common sense*

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...Error! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERTANGUNGJAWABAN PENULIS SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Konseptual	8
1. Hegemoni	8
2. Media Digital	8
3. Framing Pemberitaan	9
3. Pemberitaan Penertiban Tanah Terlantar Selama Dua Tahun Oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN ..	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	12

KAJIAN TEORITIK.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Perspektif Teoritis	21
C. Teori Hegemoni Antonio Gramsci	22
D. <i>Framing</i> Robert N. Entman	27
E. Kerangka Berpikir	29
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Subjek dan Obyek Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Dokumentasi.....	38
2. Wawancara	39
E. Teknik Analisis Data	40
1. Analisis <i>Framing</i> Model Robert Entman	41
G. Keabsahan Data	42
BAB IV.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Penelitian	44
B. Daftar Berita Penertiban tanah terlantar detikcom	47
C. Pembagian Fase Pemberitaan	49
D. Analisis <i>Framing</i> Pemberitaan Penertiban tanah terlantar detikcom..	50
1. <i>Framing</i> Pemberitaan Fase Awal	50
2. <i>Framing</i> Pemberitaan Fase Puncak Pemberitaan	60
3. <i>Framing</i> Pemberitaan Fase Landai.....	69
E. Praktik Hegemoni Dalam Pemberitaan detikcom	80
BAB V	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90

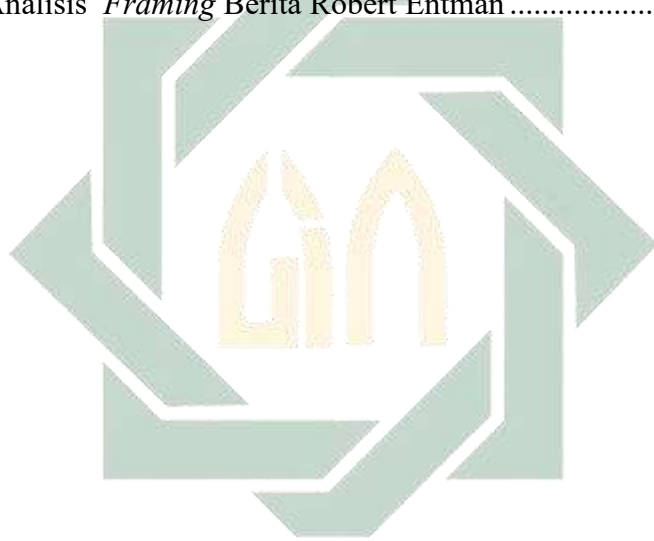
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	101
A. Teks Berita Penelitian	101
B. Lampiran Email Permohonan Wawancara	123



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Elemen Teks Berita	28
Tabel 3. 1 Element <i>Framing</i>	42
Tabel 4. 1 Daftar Berita	48
Tabel 4. 2 Fase Pemberitaan.....	49
Tabel 4. 3 Tabel Analisis <i>Framing</i> Berita Robert Entman	54
Tabel 4. 4 Tabel Analisis <i>Framing</i> Berita Robert Entman	58
Tabel 4. 5 Tabel Analisis <i>Framing</i> Berita Robert Entman	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4. 1 Logo detikcom	45



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, H. (t.t.). *Peran media massa dalam komunikasi politik di Indonesia*.
- Arasta, G. M., & Sigit, R. R. (2022). Hegemoni kekuasaan dalam pemilihan wacana berita UU ITE pada website Kementerian Komunikasi dan Informasi. *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 1(1), 58–67.
<https://doi.org/10.36441/mahardikaadiwidia.v1i1.465>
- Arief, N. P., & Andi. (2025). *Antonio Gramsci: Negara & hegemoni* (E. Prasetyo, Ed., Vol. 5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Atthahirah, A. (t.t.). Hegemoni media sosial: Akun informasi Instagram @Folkative. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*.
- Adhtiawarma D, (2025, Juli). Kebijakan Tanah Terlantar Yang Merampas Hak Prioritas Pemegang Hak detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8014260/kebijakan-tanah-telantar-yang-merampas-hak-prioritas-pemegang-hak>
- Adhtiawarma D, (2025, Agustus). Nusron Minta Maaf Soal Guyon Lahan Milik Negara, Klarifikasi Isu Tanah Ngangur detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8058113/nusron-minta-maaf-soal-guyon-lahan-milik-negara-klarifikasi-isu-tanah-nganggur>
- Adhtiawarma D, (2025, Juli). Penjelasan lengkap tanah terlantar 2 tahun bakal diambil alih negara detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015207/penjelasan-lengkap-tanah-telantar-2-tahun-bakal-diambil-alih-negara>

Adhtiawarma D, (2025, Agustus). Sempat viral Nusron tegaskan SHM nganggur
gak akan diambil negara detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8056870/sempat-viral-nusron-tegaskan-tanah-shm-nganggur-nggak-akan-diambil-negara>

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Siap-siap! Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil
negara detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8014081/siap-siap-tanah-terlantar-2-tahun-bakal-diambil-negara>

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil alih negara
detikcom <https://www.Detikcom/jogja/bisnis/d-8014190/tanah-terlantar-2-tahun-bakal-diambil-alih-negara>

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar 2 tahun diambil negara, pemilik bisa
protes detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015397/tanah-terlantar-2-tahun-mau-diambil-negara-pemilik-bisa-protes>

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar diambil negara kalau ada
bangunannya gimana? <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015085/tanah-terlantar-diambil-negara-kalau-ada-bangunannya-gimana>

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar diambil negara, pemilik dapat
kompensasi? Detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015827/tanah-terlantar-diambil-negara-pemilik-dapat-kompensasi>

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Tanah terlantar mau diambil negara, pengamat:
Aturannya harus jelas detikcom <https://www.Detikcom/properti/berita/d->

[8020951/tanah-telantar-mau diambil-negara-pengamat-aturannya-harus-jelas](https://www.detik.com/properti/berita/d-8020951/tanah-telantar-mau-diambil-negara-pengamat-aturannya-harus-jelas)

Adhtiawarma D, (2025, Juli). Yang harus dilakukan pemilik tanah kalau tidak mau tanah diambil detikcom [https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015106/yang-harus-dilakukan pemilik-kalau-nggak-mau-tanah-telantar-diambil-negara](https://www.Detikcom/properti/berita/d-8015106/yang-harus-dilakukan-pemilik-kalau-nggak-mau-tanah-telantar-diambil-negara)

Aulia, D. D, (2025, Agustus). Nusron pastikan tanah SHM rakyat bukan obyek tanah terlantar detikcom [https://news.Detikcom/berita/d-8055798/nusron-wahid-pastikan-tanah shm-rakyat-bukan-objek-tanah-terlanta](https://news.Detikcom/berita/d-8055798/nusron-wahid-pastikan-tanah-shm-rakyat-bukan-objek-tanah-terlanta)

Detikcom website traffic, ranking, analytics [October 2024] | Semrush. (t.t.).

Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.* *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.

Eriyanto. (2002). “Analisis *framing*: Konstruksi, ideologi, dan politik media” (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 224.

Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media.* Yogyakarta: LKiS.

Fahmi, I (2020) “ Omnibus Law Peta Aspirasi Publik di Media Sosial.’ Drone Emprit Publication. 5 oktober 2020. <https://pers.droneemprit.id/omnibus-lawpeta-aspirasi-publik-di-media-sosial/>

Fitrianingsih, I., Salma, Q., Zulfikar, M., dkk. (2025). Studi komparatif bahasa jurnalistik advertorial pada media online Detikcom dan Kompas.com. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 158–174. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.859>

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.

Gramsci, A. (1971). "Selections from the prison notebooks" (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers, hlm. 323.

Gramsci, A. (1971). "Selections from the prison notebooks" (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). Dalam *Selections from the Prison Notebooks* (hlm. 323). New York: International Publishers.

Hall, S. (1980). "Encoding/decoding." Dalam S. Hall, dkk. (Eds.), *Culture, media, language* (hlm. 132). London: Hutchinson.

Hall, S. (1980). "Encoding/decoding." Dalam S. Hall, dkk. (Eds.), *Culture, media, language*. London: Hutchinson.

Hidayat, A (2025) Nusron minta maaf soal tanah nganggur, bilang cuman candaan detikcom [https://www.Detikcom/bali/berita/d-8057008/nusron-minta-maaf-soal 2025 14](https://www.Detikcom/bali/berita/d-8057008/nusron-minta-maaf-soal-2025-14).

Indraswari, S. A (2025) BPKN Kritik Wacana Tanah Diambil Negara Melanggar Hak Warga Negara detikcom [https://www.Detikcom/properti/berita/d-8049159/bpkn-kritik-wacana tanah-telantar-diambil-negara-melanggar-hak-warga-negara](https://www.Detikcom/properti/berita/d-8049159/bpkn-kritik-wacana-tanah-telantar-diambil-negara-melanggar-hak-warga-negara)

Koswara, I., & Rantona, S. (2025). *Analisis framing pemberitaan Danantara oleh media Detikcom*, no. 1.

Lears, T. J. J. (1985). The concept of cultural hegemony: Problems and possibilities. *The American Historical Review*, 90(3), 567.
<https://doi.org/10.2307/1860957>

Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis *framing* model Robert Entman tentang pemberitaan kasus korupsi bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>

Masduki and D’Haenens (2020) ”Concentration of Media Ownership in Indonesia: A Setback for Viewpoint DiversitY”, *International Journal of Communication*, 16 : 2239-2259.

Muslyha, A., Boer, K. M., & Universitas Mulawarman. (t.t.). *Analisis framing pemberitaan dinasti politik Jokowi pada Pemilu Tahun 2024 di media online Kompas.com dan Tempo.co periode Oktober 2023*.

Nurhayati, M. (2023). Komunikasi politik dan peran media dalam pemilihan umum. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 1(2). <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.2154>

Pangeran, S., & Ritonga, M. U. (2024). Analisis *framing* dalam pemberitaan politik di tvonenews.com: Studi kasus pemilihan presiden 2024. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 126–139. <https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.96>

Pasal 1 Angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30. (t.t.).

Pasal 3 Ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa objek penertiban meliputi tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (t.t.).

Pasal 3 Ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021 menyebutkan bahwa objek penertiban meliputi tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya. (2021).

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PP No. 20 Tahun 2021 mengatur bahwa kepala kantor pertanahan melakukan identifikasi dan penelitian terlebih dahulu sebelum menetapkan status tanah terlantar. (2021).

Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PP No. 20 Tahun 2021 mengatur bahwa kepala kantor pertanahan melakukan identifikasi dan penelitian terlebih dahulu sebelum menetapkan status tanah terlantar. (2021).

Pasal 7–9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (t.t.).

Pasal 7–9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (t.t.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30*.

Puri, D. R., Canda, E., Chairunisa, H., dkk. (2024). Analisis penggunaan diksi dan *framing* pada media massa BBC News: Teori hegemoni Gramsci. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 2(4), 438–441.
<https://doi.org/10.62379/jishs.v2i4.1730>

- Rahmah, C. A., & Fauzi, A. M. (t.t.). *Representasi politik identitas dalam pemberitaan kampanye Presiden 2024 pada portal berita CNN Indonesia: Analisis framing Robert Entman*.
- Relasi media dan politik: Analisis framing pada media yang berafiliasi politik terhadap calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024*. (t.t.). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(6).
- Restiarum, H., Rijnanda, A. A., & Wahyuni, I. (2022). Analisis *framing* pemberitaan media online Detikcom dan Kompas.tv atas kasus kekerasan seksual di institusi KemenKop UKM RI. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 4(2), 116–126. <https://doi.org/10.53863/kst.v4i02.547>
- Shah, D. K. (2025). *Ethical compass, and reflexive agent in contemporary inquiry*, 4(1).
- Siswati, E. (2018). Anatomi teori hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 5(1), 11–33. <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Tjoetra, A., & Fahrimal, Y. (2024). *Analisis framing media Detikcom dan CNN Indonesia pada pemberitaan konflik Pulau Rempang*, 3(1).
- Wardani, A., Suprayitno, D., & Wahyuningratna, R. N. (2023). *Framing pemberitaan calon presiden pada media online CNNIndonesia.com dan Kompas.com*. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*, 6(1), 54–79. <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1181>